

MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL DI PANTI SOSIAL REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL, SENSORIK NETRA, RUNGU WICARA, TUBUH, KELURAHAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

Galih Purnama

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, galihpurnama088@yahoo.co.id

R. Enkeu Agiati

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, agiatiyenkeu@yahoo.co.id

Ernalina Syaodih

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, ernaliasyaodih@yahoo.co.id

Abstract

Capacity building refers to providing social workers the ability to handle clients with disabilities in the MENSENETRUWITU PSRPD in Cimahi City, West Java Province. The research aimed to obtain an overview and analyze about: 1) the initial capacity strengthening model for social workers, 2) the design of the capacity strengthening model for proposed social workers, and 3) the final model of capacity building for social work (improvement based on expert input). The method in this research used qualitative methods. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques used were documentation study, in-depth interviews, and participatory observation. Verification of the validity of the data is carried out by a credibility test, a transferability test, a dependability test, and a confirmability test with extended observation techniques, increasing persistence, triangulation, and using reference material. The data analysis technique used was the qualitative data analysis technique. The results showed that the need-based social worker capacity building model is practical and effective in increasing the ability of social workers. This needs-based social capacity strengthening model is carried out through assessments so that it can be applied practically and effectively. A model of strengthening the needs of social workers based on needs can improve the ability of social workers in handling people with disabilities.

Keywords:

Capacity Building, Social Worker, Secondary Research Methods, People with Disabilities, and Social Rehabilitation

Abstrak

Penguatan kapasitas merujuk pada pemberian kemampuan terhadap pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas di PSRPD MENSENETRUWITU Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis tentang: 1) model awal penguatan kapasitas bagi pekerja sosial, 2) desain model penguatan kapasitas bagi pekerja sosial yang diusulkan, dan 3) model akhir penguatan kapasitas bagi pekerja sosial (penyempurnaan berdasarkan masukan expert). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber

data dalam yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan Uji kepercayaan (credibility), Uji keteralihan (transferability), Uji ketergantungan (dependability), dan Uji kepastian (confirmability) dengan teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan merupakan model yang praktis dan efektif dalam peningkatan kemampuan pekerja sosial. Model penguatan kapasitas sosial berbasis kebutuhan ini dilakukan melalui asesmen, sehingga dapat diterapkan secara praktis dan efektif. Model penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan dapat meningkatkan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas

Kata Kunci:

Penguatan Kapasitas, Pekerja Sosial, Metode Penelitian Sekunder, Penyandang Disabilitas, dan Rehabitasi Sosial

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu isu yang mendapatkan perhatian dari pemerintah serta masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang mengarah pada perwujudan masyarakat inklusi. Pelayanan penyandang disabilitas menguatkan inklusifitas dengan memperkuat dukungan masyarakat. Pelayanan penyandang disabilitas saat ini mengarah pada *continuum care* yang artinya mengutamakan terlebih dahulu pelayanan di keluarga. Hanya orang-orang yang terpisah dari keluarga untuk kepentingan terbaik penyandang disabilitas maka pelayanan dialihkan pada pelayanan berbasis institusi. Pelayanan berbasis institusi ini berfungsi untuk menyediakan pelayanan sosial yang memadai dan komprehensif. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih berdaya dan mandiri.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dan hak-haknya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bagaimana menjamin pemenuhan kebutuhan atau hak dan melindungi agar tidak terjadi pelanggaran. Kenyataannya masih ditemukan banyak kasus-kasus pelanggaran hak pada penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut antara lain akses *Activity Daily Living (ADL)*, keterbatasan mobilitas, dukungan fasilitas untuk stimulasi *Activity Daily Living (ADL)*, keterbatasan pada akses pendidikan, maupun akses kesehatan. Permasalahan tersebut menandakan bahwa penyandang disabilitas belum memperoleh hak secara memadai

Penyandang disabilitas di Indonesia yang berjumlah 21.840.000 atau 8,56% jiwa dari 244.919.000 jiwa penduduk Indonesia berdasarkan data Survei Penduduk Antar

Sensus (SUPAS) tahun 2015. Penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang berjumlah 120.871 jiwa yang mendapatkan pelayanan di dalam lingkungan, masyarakat, maupun pelayanan berbasis institusi atau panti

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Pemerintah pusat melakukan rehabilitasi sosial melalui unit pelaksana teknis dalam bentuk balai. Pemerintah daerah tingkat provinsi melakukan rehabilitasi sosial melalui unit pelaksana teknis daerah dalam bentuk panti. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penanganan penyandang disabilitas diluar panti.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan pelayanan sosial. Salah satu bentuk pelayanan sosial yaitu rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Rehabilitasi sosial dapat membantu penyandang disabilitas dalam memecahkan masalahnya. Rehabilitasi sosial juga dapat meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk dapat menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Hal ini dapat membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri melalui rehabilitasi sosial.

Organisasi pelayanan juga dituntut memperluas target pelayanan yang semula fokus ke satu ragam disabilitas menjadi ke berbagairagam disabilitas. Terlebih pada panti di Provinsi Jawa Barat. Perluasan fungsi ini

juga berkaitan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perluasan target pelayanan juga terjadi pada panti dibawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang semula melayani penyandang disabilitas fisik dan rungu wicara, pada mulai tahun 2019 memperluas sehingga namanya pun berubah menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Sensorik Rungu Wicara dan Tubuh (PSRPD MENSENETRUWITU) Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Perluasan target pelayanan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu sumber daya manusia itu adalah pekerja sosial. Pekerja sosial berhubungan secara langsung dengan perluasan target pelayanan untuk semua ragam disabilitas. Seiring dengan perluasan target pelayanan harus diikuti penguatan kapasitas pekerja sosial sehingga penanganan penyandang disabilitas berjaladengan baik.

Penyediaan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan atau terakses terhadap pelayanan sosial dasar. Pelayanan sosial dasar ini diberikan baik berbasis institusi maupun berbasis keluarga dan masyarakat. Panti ini merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan sosial berbasis institusi.

Salah satu peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan didirikannya panti ini yang memiliki klien berjumlah 96 klien pada tahun 2019. Penyandang disabilitas intelektual berjumlah 43 klien, penyandang disabilitas sensorik berjumlah 40 klien, penyandang disabilitas sensorik netra berjumlah 3 klien, dan

penyandang disabilitas fisik berjumlah 10 klien.

Panti ini memberikan pelayanan sosial yang berlangsung selama 8 bulan, mulai dari Maret 2019 sampai dengan November 2019. Klien yang memenuhi kriteria mulai menerima pelayanan dari panti pada bulan Maret 2019. Klien yang telah menerima pelayanan sosial dari panti kemudian dikembalikan kepada keluarga pada bulan November 2019.

Pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh berbagai sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia di panti adalah pekerja sosial. Pada tahun 2019 pekerja sosial di panti ini berjumlah 5 orang terdiri dari 4 orang perempuan dan 1 laki-laki. Pekerja sosial memiliki tugas yang sangat penting dalam pemberian pelayanan sosial di panti yaitu membangkitkan kepercayaan diri, harga diri dan menumbuhkan kemandirian serta keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Selain itu pekerja sosial bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota, organisasi sosial dan lembaga sosial masyarakat.

Pengembangan kapasitas pekerja sosial yang sudah dilakukan di panti adalah pelatihan-pelatihan yang diadakan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, serta studi banding ke panti-panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas lainnya. Namun dari pelatihan tersebut masih ditemukan beberapa kendala antara lain intensitas pelatihan yang jarang dilakukan. Pelatihan pekerja sosial hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun dan bersifat umum untuk seluruh pekerja sosial di lingkup Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sehingga materi pelatihan tidak selalu membahas tentang disabilitas pada setiap tahunnya. Padahal pelatihan pekerja sosial idealnya dilakukan tiga kali dalam 1 tahun dengan materi yang

disesuaikan dengan kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial di panti. Pelatihan belum efektif terhadap penguatan kapasitas pekerja sosial. Hal ini berdasarkan padatemuan praktikum tentang profil manajemen pelayanan organisasi kemanusiaan di panti.

Selain itu peneliti mengamati bahwa pekerja sosial belum memiliki kapasitas memadai terkait asesmen dengan menggunakan teknologi pekerjaan sosial, pembuatan instrumen-instrumen terkait penanganan ragam penyandang disabilitas, recording atau pencatatan masalah-masalah klien serta metode dan teknik intervensi pekerjaan sosial terhadap ragam disabilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari 3 informan utama dan 1 informan pendukung. Informan utama merupakan pekerja sosial. Informan pendukung adalah kepala panti. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu dan laporan hasil praktikum di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara dan Tubuh (PSRPD MENSENETRUWITU) Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Penjelasan istilah diperlukan agar tidak salah dalam menginterpretasikan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan istilah dalam penelitian ini meliputi:

1. Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana, atau desain deskripsi yang menjelaskan penguatan kapasitas pekerja sosial dengan disabilitas. Model Disini berupa rancangan penguatan kapasitas
2. Penguatan kapasitas merupakan kegiatan-

kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pekerja sosial di panti dalam memberikan pelayanan terhadap klien penyandang disabilitas secara memadai dan komprehensif, sehingga penyandang disabilitas dapat mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas masing-masing.

3. Pekerja sosial merupakan sumber daya manusia yang melakukan pelayanan terhadap klien penyandang disabilitas di panti.
4. Panti merupakan pusat pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi penelitian tentang penguatan kapasitas pekerja sosial.

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pekerja sosial melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi dan studi dokumentasi. Teknik untuk menentukan subyek yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan purposive yang berarti pengambilan subyek secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan. Pada teknik pengambilan subyek yang ditentukan dengan pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian model penguatan kapasitas pekerja sosial di panti.

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data sekunder meliputi penelitian terdahulu dan dokumen yang berhubungan dengan panti dan pekerja sosial. Dokumen tersebut yaitu profil dari panti, daftar kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh panti kepada penyandang disabilitas di panti dan landasan hukum terkait panti. Sumber data sekunder dikumpulkan lalu dipahami serta dipelajari untuk melengkapi dan

menunjang informasi yang diperoleh dari sumber data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi serta studi dokumentasi. Setelah dilakukan diskusi dengan pekerja sosial kemudian dilakukan tindakan partisipatori pada saat praktikum.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan Uji kepercayaan (credibility), Uji keteralihan (transferability), Uji ketergantungan (dependability), dan Uji kepastian (confirmability).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Sensorik Rungu Wicara dan Tubuh (PSRPD MENSENETRUWITU) Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Panti ini merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan sosial berbasis institusi dalam penanganan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat. Panti ini merupakan salah satu bentuk dari peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Pemerintah daerah tingkat provinsi melakukan rehabilitasi sosial melalui unit pelaksana teknis daerah dalam bentuk panti. Pemerintah daerah juga diberikan mandat untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan- layanan baik secara langsung kepada penyandang disabilitas atau layanan-layanan yang menguatkan dukungan keluarga dan

organisasi- organisasi layanan. Hal ini dilaksanakan oleh panti.

Panti ini awalnya melayani penyandang disabilitas fisik dan sensorik rungu wicara. Pada tahun 2019 panti ini mengalami perluasan target pelayanan dengan memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas intelektual dan sensorik netra sehingga saat ini panti memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, intelektual dan sensorik. Pelayanan berlangsung selama 8 bulan. Pelayanan mulai dari Bulan Maret sampai dengan November. PSRPD MENSENETRUWITU hanya menerima klien yang sesuai dengan kriteria masuk di PSRPD MENSENETRUWITU. Klien yang memenuhi kriteria tersebut mulai menerima pelayanan dari panti pada bulan Maret 2019. Setelah klien menerima pelayanan sosial dari panti selama 8 bulan kemudian dikembalikan kepada keluarga pada bulan November.

Panti ini memiliki berbagai program pelayanan. Program pelayanan yang dilaksanakan oleh panti meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan. Bimbingan fisik diberikan kepada penyandang disabilitas, meliputi : olahraga dan rekreasi. Klien berolahraga secara rutin meliputi senam dan bela diri safety fun. Klien diberikan bimbingan mental, meliputi: shalat berjamaah, ceramah rutin dan pemahaman baca tulis al-qur'an. Klien diberi bimbingan sosial, meliputi bimbingan individual dan imbingan kelompok. Gambar ini menunjukkan bahwa klien mengikuti senam di panti. Senam merupakan salah satu bimbingan fisik di panti. Senam ini dipandu oleh seorang instruktur senam. Pekerja sosial juga ikut mendampingi klien pada saat senam. Pada saat senam ini pekerja sosial juga melakukan observasi terhadap perilaku klien di panti

Selain itu klien diberi bimbingan keterampilan, meliputi : keterampilan bengkel, tata rias, handicraft, pertukangan kayu, elektronika dan pertukangan bangunan. Klien juga diberikan keterampilan ekstrakurikuler, meliputi : pijat(massage), olah pangan/tata boga, housekeeping dan batu mulia. Klien diberikan keterampilan penunjang, meliputi : kewirausahaan, tari, olah vokal dan seni musik. Klien panti pada tahun 2019 berjumlah 97 klien. Penyandang disabilitas intelektual berjumlah 43 klien.

Kelas handicraft merupakan salah satu kelas keterampilan di Panti. Pekerja sosial juga ikut mendampingi klien pada saat klien mengikuti bimbingan keterampilan ini. Pekerja sosial juga melakukan observasi terhadap potensi klien pada saat mengikuti bimbingan keterampilan ini. Selain itu pekerja sosial melakukan observasi terhadap perkembangan perilaku klien pada saat klien mengikuti bimbingan keterampilan ini. Penyandang disabilitas sensorik rungu wicara berjumlah 40 klien. Penyandang disabilitas sensorik netra berjumlah 3 klien. Penyandang disabilitas fisik berjumlah 11 klien.

Bimbingan mental dipandu oleh seorang ustad dan didampingi seorang penterjemah bahasa isyarat. Ustad tersebut menyampaikan ilmu pengetahuan tentang agama. Bimbingan mental ini dilakukan di mesjid setelah klien melaksanakan Shalat Magrib. Pelaksanaan bimbingan mental ini di luar jam kerja sehingga pekerja sosial tidak bisa mendampingi klien pada saat klien mengikuti bimbingan mental. Pekerja sosial hanya berkoordinasi dengan ustad dan penterjemah bahasa isyarat terkait perkembangan klien pada saat bimbingan mental. Pekerja sosial menggali informasi dari ustad dan penterjemah bahasa isyarat untuk mengetahui kekuatan dan

kelamahan klien terkait bimbingan mental di panti.

Gambar ini menunjukkan bahwa klien mengikuti bimbingan sosial di aula panti. Bimbingan Sosial di aula ini wajib diikuti oleh semua klien di panti. Bimbingan sosial ini disampaikan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial menyampaikan nasehat supaya klien mentaati peraturan yang berlaku di panti. Pada saat bimbingan sosial ini pekerja sosial melakukan observasi terhadap perilaku klien di panti.

Profil Lembaga

Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh (PSRPD MENSENETRUWITU) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh

Nomenklatur panti mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2002 nomenklatur panti bernama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC), selanjutnya pada tahun 2014 berganti nama menjadi Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas (BRSPD). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, nomenklatur BRSPD berganti nama menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh (PSRPD MENSENETRUWITU)

Model Awal Penguatan Kapasitas Bagi Pekerja Sosial

Berdasarkan hasil praktikum ditemukan bahwa kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial sebagai prioritas sehingga peneliti melanjutkan dalam penelitian ini. Peneliti mengetahui model awal penguatan kapasitas bagi pekerja sosial melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pekerja sosial perlu ditingkatkan. Pekerja sosial masih memiliki kekurangan dalam penanganan klien penyandang disabilitas di panti. Kekurangan tersebut teridentifikasi pada beberapa hal, meliputi : asesmen dengan menggunakan teknologi pekerjaan sosial, pembuatan instrumen-instrumen terkait penanganan ragam penyandang disabilitas, recording atau pencatatan tentang klien serta metode dan teknik intervensi pekerjaan sosial terhadap ragam disabilitas.



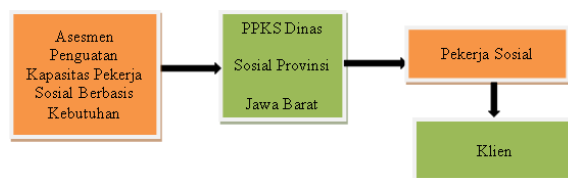
Bagan 1: Model awal penguatan kapasitas pekerja sosial di Panti

Desain Model Penguatan Kapasitas Bagi Pekerja Sosial yang Diusulkan

Desain model Penguatan Kapasitas di panti adalah penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan melalui asesmen. Pada model awal di atas menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pekerja sosial secara langsung ditentukan oleh balai diklat terhadap pekerja sosial tanpa melalui asesmen kebutuhan. Model awal penguatan kapasitas pekerja sosial tersebut bersifat top-down. Model awal penguatan

kapasitas tersebut tidak meningkatkan kemampuan pekerja sosial karena tidak berhubungan dengan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas di panti. Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pekerja sosial pada model awal penguatan kapasitas tersebut. Setelah dilakukan wawancara dengan pekerja sosial diketahui bahwa pekerja sosial memiliki usulan terkait penguatan kapasitas berbasis kebutuhan melalui asesmen kebutuhan terhadap pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas di panti.

Usulan pekerja sosial ini menjadi dasar bagi peneliti untuk membuat desain model penguatan kapasitas pekerja sosial di panti. Selain itu peneliti mengacu pada konsep tentang tahapan pokok dalam pelatihan bahwa penilaian kebutuhan (need assessment) pelatihan merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pelatihan. Tahap ini berguna sebagai dasar bagi keseluruhan upaya pelatihan. Tahap pelaksanaan maupun tahap evaluasi pelatihan sangat bergantung pada tahap ini. Jika penentuan kebutuhan pelatihan tidak akurat, maka arah pelatihan akan menyimpang. Kebutuhan-kebutuhan bagi pelatihan harus diperiksa. Selain itu sumber-sumber daya yang tersedia untuk pelatihan baik yang dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal harus diperiksa juga.



Gambar 1: Desain Model Penguatan Kapasitas Pekerja Sosial di Panti

Model Akhir Penguatan Kapasitas Bagi Pekerja Sosial Disempurnakan Berdasarkan Masukan Expert

Berdasarkan desain model penguatan kapasitas pekerja sosial menunjukkan bahwa model penguatan kapasitas pekerja sosial harus sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial melalui asesmen kebutuhan. Selanjutnya peneliti merancang model akhir penguatan kapasitas pekerja sosial. Model akhir penguatan kapasitas pekerja sosial ini mengacu pada desain model penguatan kapasitas pekerja sosial yang disempurnakan oleh expert. Pada model akhir ini bersifat bottom-up melalui asesmen kebutuhan terhadap pekerja sosial serta terdapat keterlibatan panti dalam penguatan kapasitas pekerja sosial. Panti harus menganggarkan untuk kegiatan penguatan kapasitas pekerja sosial sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial.

Penguatan kapasitas berdasarkan kebutuhan pekerja sosial dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan praktik pekerja sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Alfitri bahwa penguatan kapasitas memperkuat ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada model akhir ini panti diharapkan dapat ikut berperan dalam hal penguatan kapasitas pekerja sosial dengan berbagai kegiatan penguatan kapasitas pekerja sosial yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial melalui asesmen kebutuhan.

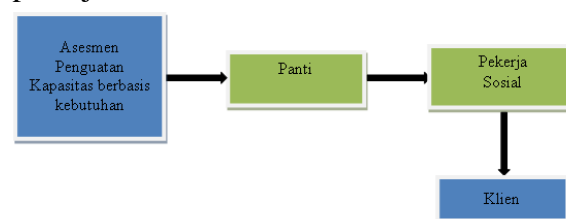
Selama ini pekerja sosial jarang mendapatkan pelatihan. Selain pelatihan itu jarang, materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial di Panti. Hal itu menyebabkan penguatan kapasitas pekerja

sosial tidak efektif karena tidak berhubungan dengan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas di panti

Penguatan kapasitas yang tidak berhubungan dengan praktik pekerjaan sosial disabilitas di panti itu tidak dapat meningkatkan kemampuan pekerja sosial dalam memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal itu peneliti merancang model penguatan kapasitas pekerja sosial di panti yang berjudul Model PEKAPEKSOS BERSAMA. Model ini merupakan singkatan dari Penguatan Kapasitas Berbasis kebutuhan melalui asesmen. Tujuan dari Model ini adalah meningkatkan kapasitas pekerja sosial di panti dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas.

Target perubahan pada Model ini adalah pekerja sosial. Sasaran dari model ini adalah panti agar mendukung penguatan kapasitas berbasis kebutuhan melalui asesmen. Pelaksana perubahan pada Model ini adalah kepala panti. Kepala panti merencanakan kegiatan penguatan kapasitas pekerja sosial dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas. Narasumber menyajikan materi tentang ilmu pekerjaan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial. Narasumber tersebut adalah dosen dan praktisi yang kompeten di bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas yang memberikan pelatihan kepada pekerja sosial berdasarkan asesmen kebutuhan.



Gambar 2: Model Akhir Penguatan Kapasitas Pekerja Sosial di Panti

Implikasi Teori

Implikasi dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pekerjaan sosial khususnya terkait model penguatan kapasitas pekerja sosial. Implikasi teori terkait dengan kesesuaian antara teori penguatan kapasitas pekerja sosial dan implementasi penguatan kapasitas pekerja sosial. Implikasi teori ini berkaitan dengan Teori sistem. Penelitian ini menguatkan Teori sistem dalam pekerjaan sosial bahwa setiap bagian saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa model penguatan kapasitas pekerja sosial harus berhubungan dengan kebutuhan pekerja sosial melalui asesmen sehingga terdapat kesesuaian antara kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial dengan model penguatan kapasitas pekerja sosial yang diimplementasikan.

Berdasarkan hal itu pekerja sosial memerlukan model penguatan kapasitas berbasis kebutuhan sehingga kemampuan pekerja sosial memadai. Penguatan kapasitas ini ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan klien sehingga lebih optimal. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pekerja sosial harus memiliki 3 kerangka utama pekerjaan sosial yaitu kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai .

Berdasarkan hal itu penguatan kapasitas pekerja sosial meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Alfitri bahwa penguatan kapasitas memperkuat ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Penguatan kapasitas ini seharusnya terlebih dahulu dilakukan asesmen kebutuhan

(need assessment) yang merupakan tahapan pokok paling penting sebelum penyelenggaraan pelatihan. Hal ini terkait dengan evaluasi awal yang terdapat dalam konsep bahwa evaluasi awal harus dilakukan supaya penentuan materi dan metode pelatihan dapat dilakukan dengan tepat sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai. Pada saat ini belum ada evaluasi awal dari pelatihan sehingga metode dan materi pelatihan tidak tepat

Metode dan materi pelatihan yang tidak tepat menyebabkan tujuan pelatihan belum tercapai karena tidak dapat diimplementasikan kepada klien.

Selain itu balai diklat juga menentukan pemateri pelatihan. Penentuan pemateri pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan pelatihan tidak berhasil. Pada konsep tentang pelatihan salah satu prinsip yang dapat membuat pelatihan berhasil adalah prinsip pemilihan pelatih. Pemilihan pelatih atau pemateri yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial dapat mengakibatkan penguatan kapasitas tidak efektif.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato berpendapat bahwa penguatan kapasitas merupakan proses peningkatan kemampuan. Proses peningkatan kemampuan ini ditujukan terhadap individu. Penguatan kapasitas individu dalam hal ini dilakukan terhadap pekerja sosial. Penguatan kapasitas seharusnya dapat meningkatkan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan klien.

Pada Saat ini model penguatan kapasitas tidak berdasarkan kebutuhan pekerja sosial sehingga kemampuan pekerja sosial belum memadai. Asesmen kebutuhan (need assessment) tidak dilakukan sebelum pelatihan sehingga pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial. Pelatihan yang tidak

sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial tidak dapat meningkatkan kemampuan pekerja sosial.

Kemampuan pekerja sosial akan meningkat apabila memperoleh penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan klien. Penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial dapat membuat kemampuan pekerja sosial memadai. Kemampuan pekerja sosial yang memadai akan berpengaruh pada kualitas penanganan klien yang baik. Kualitas penanganan klien yang baik dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses perubahan perilaku klien sehingga klien dapat memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, menjalankan peran sesuai dengan status dan mengaktualisasikan diri.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis adalah model penguatan kapasitas berbasis kebutuhan dalam rangka memberikan layanan bagi penyandang disabilitas di panti. Model penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan merupakan model yang praktis dan efektif dalam peningkatan kemampuan pekerja sosial di panti. Model penguatan kapasitas sosial berbasis kebutuhan dapat diterapkan secara praktis dan efektif dengan berdasarkan pada visi dan misi panti.

Visi panti ini adalah Memberi Layanan Terdepan Bagi Penyandang Disabilitas Di Jawa Barat. Misi panti adalah meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya misi panti yaitu membangkitkan kepercayaan diri, harga diri dan menumbuhkan kemandirian serta keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Selain itu misi panti adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota, organisasi sosial dan lembaga sosial masyarakat.

Implikasi praktis dari penelitian ini secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan dimensi pekerjaan sosial bahwa yang menjadi target penelitian adalah individu yang berprofesi melakukan penanganan langsung terhadap penyandang disabilitas dalam hal ini pekerja sosial di panti. Hal ini merujuk kepada model penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan sehingga tercapai peningkatan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas di panti. Peningkatan kemampuan pekerja sosial terkait dengan Memberikan Layanan Terdepan Bagi Penyandang Disabilitas Di Jawa Barat. Selanjutnya peningkatan kemampuan pekerja sosial dapat meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di panti. Peningkatan kemampuan pekerja sosial juga dapat membangkitkan kepercayaan diri, harga diri dan menumbuhkan kemandirian serta keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Selain itu peningkatan kemampuan pekerja sosial dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota, organisasi sosial dan lembaga sosial masyarakat.

Kemampuan pekerja sosial yang baik berpengaruh terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, menjalankan peran sesuai dengan status dan mengaktualisasikan diri. Pada konteks ini peneliti fokus kepada model penguatan kapasitas pekerja sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja sosial. Saat ini model penguatan kapasitas belum sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial terkait praktik pekerjaan sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas. Penelitian ini mengupayakan model penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan. Hal ini bertujuan supaya kemampuan pekerja sosial

memadai dalam penanganan klien penyandang disabilitas. Model akhir penguatan kapasitas yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pekerja sosial dalam hal asesmen dengan teknologi pekerjaan sosial, pembuatan instrumen- instrumen berbagai ragam disabilitas, pencatatan tentang klien serta metode dan teknik pekerjaan sosial.

Model penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan efektif dalam penanganan klien penyandang disabilitas karena didasari pada kebutuhan pekerja sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pekerja sosial dan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas yang terdiri dari berbagai ragam disabilitas di Panti.

Pekerja sosial memerlukan model penguatan kapasitas berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas.

Penerapan model akhir ini diawali dengan melakukan asesmen. Asesmen ini dilakukan untuk menggali kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas. Pekerja sosial melakukan asesmen kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial dengan cara berdiskusi melalui partisipasi dari seluruh pekerja sosial di panti. Model akhir penguatan kapasitas pekerja sosial ini bersifat bottom up karena dilakukan melalui asesmen berdasarkan kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial di panti. Asesmen dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari semua pekerja sosial di panti melalui diskusi terkait metode penguatan kapasitas, teknik, materi, waktu dan tempat. Setelah pekerja sosial merumuskan kebutuhan penguatan kapasitas kemudian pekerja sosial menyampaikan rumusan kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial ke Kepala panti.

Saat ini panti belum terlibat dalam penguatan kapasitas pekerja sosial. Panti hanya mempercayakan penguatan kapasitas pekerja sosial kepada Balai Diklat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Pada model ini panti akan terlibat dalam penguatan Kapasitas pekerja sosial. Kepala panti mempersilahkan pekerja sosial untuk menggali kebutuhan-kebutuhan pekerja sosial dalam rangka penguatan kapasitas pekerja sosial. Kepala panti menerima rumusan kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial di panti. Rumusan penguatan kapasitas pekerja sosial tersebut didiskusikan kembali bersama-sama antara pekerja sosial dengan Kepala panti. Setelah rumusan penguatan kapasitas pekerja sosial berbasis kebutuhan disepakati bersama kemudian kepala panti membuat kebijakan terkait pelaksanaan penguatan kapasitas pekerja sosial tersebut dengan membuat rencana anggaran.

Pelaksanaan penguatan kapasitas pekerja sosial di Panti melibatkan dosen dan praktisi yang kompeten di bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas. Dosen dan praktisi tersebut dapat berkontribusi dalam penguatan kapasitas pekerja sosial di Panti sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial melalui asesmen. Pihak panti mengajukan kepada dosen dan praktisi terkait rumusan kebutuhan pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial dari hasil asesmen antara pekerja sosial dan kepala panti. Dosen dan praktisi didatangkan untuk menyajikan materi terkait pekerjaan sosial dengan disabilitas yang dibutuhkan untuk pekerja sosial. Expert memberikan materi-materi secara terpadu dan komprehensif terkait praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial di panti.

KESIMPULAN

Lokasi penelitian dalam penelitian ini Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Sensorik Rungu Wicara dan Tubuh (PSRPD MENSENETRUWITU) Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan sosial berbasis institusi dalam penanganan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat. Panti ini merupakan salah satu bentuk dari peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat.

Subjek penelitian ini adalah pekerja sosial fungsional dengan triangulasi kepada kepala panti. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 orang pekerja sosial di panti. Ketiga pekerja sosial dalam penelitian tersebut adalah I, IS dan P. Ketiga pekerja sosial ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini terdapat informan pendukung yaitu F. F adalah kepala panti.

Model awal penguatan kapasitas pekerja sosial dilaksanakan melalui pelatihan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengadakan pelatihan bagi pekerja sosial melalui Balai diklat yang dikenal dengan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (PPKS.). Balai diklat menyelenggarakan pelatihan terhadap pekerja sosial setiap satu kali dalam 1 tahun. Pelatihan bersifat top down karena Balai diklat yang menentukan metode pelatihan, materi, narasumber, waktu dan tempat. Saat ini materi pelatihan hanya terkait masalah-masalah terkini yang sedang muncul di masyarakat. Selain itu pelatihan hanya berupa pengetahuan terkait dengan jabatan fungsional pekerja sosial.

Berdasarkan hal itu Pelatihan terhadap pekerja sosial tidak berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial dengan disabilitas. Pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial di panti. Hal ini menyebabkan kemampuan praktik pekerja sosial belum memadai. Pekerja sosial membutuhkan model penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan melalui asesmen. Apabila model ini digunakan memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan penyandang disabilitas di panti.

Pekerja sosial tidak dapat menerapkan hasil pelatihan terhadap klien karena pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas di panti. Pelatihan tidak berhubungan dengan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas di panti. Hal ini mengakibatkan pekerja sosial tidak bisa mengimplementasikan hasil pelatihan terhadap klien sehingga penanganan masalah klien penyandang disabilitas di panti belum optimal.

Pada desain model penguatan kapasitas pekerja sosial ini Balai diklat terlebih dahulu melakukan asesmen kebutuhan pekerja sosial sebelum Balai diklat Mengadakan pelatihan. Balai diklat mengundang pekerja sosial dari Panti untuk berdiskusi terkait penguatan kapasitas pekerja sosial yang dibutuhkan dalam penanganan penyandang disabilitas di panti. Balai diklat mempersilahkan pekerja sosial untuk menggali kebutuhan pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas di panti. Pada model penguatan kapasitas pekerja sosial ini tidak bersifat top down.

Penguatan Kapasitas Pekerja sosial didasarkan pada kebutuhan pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang

disabilitas di panti melalui asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk menggali kebutuhan pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerjaan sosial di panti. Asesmen dilakukan berdasarkan masukan- masukan dari pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas.

Pekerja sosial menyampaikan kebutuhan pekerja sosial dalam penanganan klien di panti. Kebutuhan pekerja sosial tersebut terkait materi pelatihan, metode pelatihan, teknik pelatihan dan waktu pelatihan. Setelah itu Balai Diklat Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melaksanakan pelatihan sesuai masukan-masukkan dari pekerja sosial di panti.

Pada desain model penguatan kapasitas pekerja sosial ini melibatkan pekerja sosial dalam perencanaan pelatihan. Pelatihan untuk pekerja sosial bersifat bottom up. Pekerja sosial mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial di panti.

Pekerjasosial dapat mengimplementasikan hasil pelatihan terhadap klien apabila pelatihan sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan klien di panti. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial memungkinkan pada peningkatan kemampuan pekerja sosial dalam penanganan klien penyandang disabilitas di panti menjadi memadai. Kemampuan pekerja sosial yang memadai akan berpengaruh pada penanganan klien penyandang disabilitas di panti. Penanganan klien lebih optimal sehingga klien dapat memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, menjalankan peran sesuai dengan status dan mengaktualisasikan diri.

Saat ini panti belum terlibat dalam penguatan kapasitas pekerja sosial. Panti hanya mempercayakan penguatan kapasitas pekerja sosial kepada Balai Diklat. Pada model ini Panti

akan terlibat dalam penguatan Kapasitas pekerja sosial. Kepala panti mempersilahkan pekerja sosial untuk menggali kebutuhan-kebutuhan pekerja sosial dalam rangka penguatan kapasitas pekerja sosial. Kepala panti membuat kebijakan yang dapat mendukung penguatan kapasitas pekerja sosial tersebut.

Pekerja sosial melakukan asesmen kebutuhan penguatan kapasitas pekerja sosial di panti. Model akhir penguatan kapasitas pekerja sosial ini bersifat bottom up karena dilakukan melalui asesmen. Asesmen melibatkan partisipasi dari pekerja sosial di panti. Asesmen dilakukan bersama-sama antara pekerja sosial dengan Kepala panti. Asesmen dilakukan dengan cara diskusi terkait metode penguatan kapasitas, teknik, materi, waktu dan tempat. Setelah asesmen itu dilakukan kemudian pelaksanaan penguatan kapasitas pekerja sosial di panti

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa penguatan kapasitas pekerja sosial ini harus berdasarkan kebutuhan yang melibatkan pekerja sosial. Pada rekomendasi ini bertujuan agar penguatan kapasitas lebih efektif, komprehensif dan terpadu yang berbasis pada kebutuhan pekerja sosial melalui asesmen. Peneliti mengusulkan rekomendasi untuk keberlanjutan penguatan kapasitas berbasis kebutuhan pekerja sosial melalui asesmen tersebut. Berdasarkan hasil kesimpulan terkait dengan model ini, maka peneliti mengajukan rekomendasi.

Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat agar memberikan dukungan pada model penguatan kapasitas berbasis kebutuhan melalui asesmen. Tujuannya agar pekerja sosial memberikan

layanan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas. Sasarannya adalah pekerja sosial fungsional di panti. Pelaksana perubahan yaitu dosen dan praktisi pada bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan anggaran terkait asesmen untuk penentuan penguatan kapasitas pekerja sosial
2. Memberikan sarana dan prasarana
3. Menyediakan fasilitas untuk penguatan kapasitas pekerja sosial

Rekomendasi ditujukan kepada Kepala panti agar mendukung dan menindaklanjuti model penguatan kapasitas berbasis kebutuhan melalui asesmen. Tujuannya agar pekerja sosial memberi layanan berkualitas bagi penyandang disabilitas di panti. Sasaran adalah pekerja sosial fungsional di panti. Pelaksana perubahannya adalah dosen dan praktisi pada bidang pekerjaan sosial dengan disabilitas.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana kegiatan penguatan kapasitas pekerja sosial
2. Merencanakan anggaran untuk penguatan kapasitas pekerja sosial
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penguatan kapasitas pekerja sosial
4. Menyediakan fasilitas untuk penguatan kapasitas pekerja sosial

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT Refika Aditama.
- Abu Huraerah. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora

Alfitri. 2011. *Community Development: Teoridan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Bambang Swasto. 2011. *Manajemen SumberDaya Manusia*. Malang: Universitas Brawijaya

Bambang Warsita. 2008. *Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta

Dubois, Karla. & Michael. *Generalist Social Work Practice Eighth Edition*. USA :USA.Pe arson

Edi Suharto. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Hadari Nawawi. 2017. *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press

Handoko. 2006. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE

Hasibuan. 2014. *Manajemen Sumber DayaManusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi

Aksara

_____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara

Herman Sofyandi. Cetakan Kedua. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graham Ilmu

Irham Fahmi. 2016. *Manajemen Sumber DayaManusia*. Bandung: Alfabeta

Jusman Iskandar. 2005. *Dinamika Kelompok, Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Bandung: Puspaga

Kusuma Wijaya dan Dwitagama Dedi. 2010. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Indeks

Manullang Marihot. 2001. *Manajemen SumberDaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat

Mckenna, Eugene & Beech, Nic. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*;

- Ed. I., Diterjemahkan oleh Totok Budi Santosa. Andi, Yogyakarta
- Nawawi Hadari. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Rivai & Sagala. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rothman. 2018. *Social Work Practice Across Disability*. USA : Pearson Education
- Sayuti Hasibuan. 2014. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia
- Sedarmayanti. 2010. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-12. Bandung: Alfabeta
- Sukiman. 2012. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Pedagogia
- Susilo Martoyo. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Sutjihati Soemantri. 2012. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung : PT. Refika Aditama
- The Liang Gie dan Buddy Ibrahim. 2010. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Umar. 2004. *Riset Sumber Daya Manusia dan Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yvonna.S & Norman.K. 2009. *Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Prof. Dr. H. Mustofa Kamil. 2012. *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta
- PENELITIAN TERDAHULU:**
- Dedeh Bahagiati. 2018. Penguatan Kapasitas Pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Annisa Nur Fathin. 2017. Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Imas Siti Masithoh. 2014. Penguatan Kapasitas Organisasi Lokal Tim Perlindungan Sosial Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
- JURNAL:**
- https://www.researchgate.net/publication/327969956_PENGEMBANGAN_MODE_L_JURNAL_BELAJAR (diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 16:30)